

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis. 2010. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Hlm 25
- CF Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung. Hlm 115
- Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 114
- Mukhlis. 2014. *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*.
- Syamsuddin Haris . 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21
- UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22
- Soerjono Soekanto. 1986. *Hlm. 123*
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Tentang Wewenang*. Yuridika No.5&6 Tahun XII September – Desember. Hlm.1
- Ganjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm. 93
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Bayu Surianingrat. *Desa dan Kelurahan* . Armico. Bandung. Hlm 57
- Taliziduhu Ndraha. 1984. *Dimensi dimensi pemerintahan Desa*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm.78
- E. Utrecht. 1984. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Balai Buku Ihtiar. Jakarta. Hlm.8
- Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan)
- Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2)

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm. 854
- Tuti A. Verawati. 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, Universitas 45 Makassar . Makassar. Hlm. 9
- HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3
- Ibid., hlm. 76.
- Ibid., hlm. 85.
- T. Coser dan Anthony Rosenberg. 1976. *An Introduction to International Politics*. New Jersey. Prentice Hall. Hlm. 232-255.
- Helni Sadid Parassa, *Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*
- Ginandjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides. Jakarta. Hlm. 135
- Ibid., Hlm. 141
- Pudjiwat Sajogyo. 1960. *Sosiologi Pedesaan*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta. Hlm. 140
- Undang -Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Desa
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Grafindo Persada. Jakarta Hlm. 58